



Kinerja BPOM dalam Angka Triwulan II 2023

Kinerja BPOM dalam Angka Triwulan II Tahun 2023

Sambutan Kepala BPOM RI



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dituangkan dalam "Kinerja BPOM Dalam Angka". Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi premarket, hingga pengawasan post-market yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 82.179 NIE, pemeriksaan terhadap 13.997 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 32.694 sampel, 151 perkara, dan 109 kegiatan pelaksanaan KIE.

Tahun 2023 diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi mengingat pandemi Covid-19 sudah mulai melandai. Untuk mendukung hal tersebut, BPOM semakin intensif dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM supaya produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 14 September 2023

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Daftar Isi

SAI	MBUTAN BPOM RI	iii
DA	FTAR ISI	iv
DA	FTAR GAMBAR	V
DA	FTAR TABEL	vi
HIG	GHLIGHT	2
l.	Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan	7
II.	Penindakan di Bidang Obat dan Makanan	13
III.	Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman	17
IV.	Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman	21
V.	Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan	23
VI.	Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat	25
VII.	Digitalisasi Pelayanan Publik	35
VIII	. Penguatan Peraturan Perundang-undanngan Pengawasan Obat dan Makanan	39
IX.	Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana	
	serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	43
X.	Kerjasama Internasional	47
XI.	Sumber Daya Manusia	53
XII.	Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I 2023	55
XIII	. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	57
LA	MPIRAN 1	59
LA	MPIRAN 2	99

Daftar Gambar

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan7
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan
	Sebelum Beredar/Dipublikasikan
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan8
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan
Gambar 5.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan11
Gambar 6.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan11
Gambar 7.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan12
Gambar 8.	Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan13
Gambar 9.	Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan Berdasarkan
	Komoditi s.d Triwulan II 202314
Gambar 10.	Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan II 202315
Gambar 11.	Kemajuan Perkara Tindak16
Gambar 12.	Data Publikasi Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi s.d. Triwulan II 202325
Gambar 13.	Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan II 2023 26
Gambar 14.	Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform
	Hingga Triwulan II 202327
Gambar 15.	Top engagement content terkait Badan POM pada platform
	Facebook, Twitter, Instagram28
Gambar 16.	Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan
	hingga Triwulan II 202328

Gambar 17.	Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media	
	Pada Triwulan II 2023	29
Gambar 18.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	
	Triwulan I Tahun 2023	30
Gambar 19.	Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM	
	Berdasarkan Profesi	31
Gambar 20.	Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM	
	Berdasarkan Jenis Media	32
Gambar 21.	Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan	
	oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi	32
Gambar 22.	Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan	
	atau Ditanyakan kepada Badan POM	33
Gambar 23.	Aktivitas pada BPOM Mobile Periode 2018 – 30 Juni 2023	
Gambar 24.	Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM	
	s.d. Triwulan II 2023	42
Gambar 25.	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II 2023	55

Daftar Tabel

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)	9
Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)	10
Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping	12



Kinerja BPOM dalam Angka Triwulan II Tahun 2023



HIGHLIGHT Badan POM s.d Triwulan II

Produk Pangan Hewani Indonesia Siap Masuk Pasar Arab Saudi.



Jakarta- BPOM RI hari ini melakukan kick off meeting terkait tindak lanjut hasil pertemuan dengan Saudi Food and Drugs Authority (SFDA) bersama perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan serta Kementerian Luar Negeri Selasa (18/04/2023). Pertemuan ini membahas kesiapan produk pangan hewani termasuk perikanan Indonesia yang akan di ekspor ke tanah suci.





Berbagi Berkah Ramadan, BPOM Adakan Bakti Sosial



Jakarta - BPOM adakan bakti sosial dalam rangka saling berbagi di bulan Ramadan yang suci di Auditorium Merah Putih BPOM, Selasa (18/04/2023). Kegiatan bertajuk Bakti Sosial Ramadan BPOM RI, KORPRI BPOM, dan BPOM Peduli ini mengangkat tema "Sucikan Hati dengan Berbagi dan Perkuat Silaturahmi bersama Insan BPOM yang Berakhlakul Karimah". Acara ini bertujuan untuk saling mempererat silaturahmi antar pegawai BPOM dengan membagikan bingkisan lebaran kepada para anak yatim, petugas kebersihan, teknisi, driver, dan satpam yang bekerja di BPOM.



>

Kolaborasi BPOM dengan WHO SEARO Gelar Workshop Peningkatan Jaminan Kualitas Obat di Regional Asia Tenggara



Jakarta - BPOM bersama World Health Organisation South-East Asia Regional Office (WHO SEARO) menggelar "Regional Workshop on Ensuring Quality of Medicines from Contaminated Substances" pada tanggal 2 – 4 Mei 2023 di Jakarta. Workshop ini bertujuan memperkuat kapasitas regulatori serta meningkatkan kesetaraan akses terhadap obat aman, berkhasiat, dan bermutu bagi negaranegara yang tergabung dalam SEARO.





Puteri Indonesia sebagai Trendsetter Obat dan Makanan Bermanfaat dan Bermutu



Jakarta - BPOM bersama dengan Yayasan Puteri Indonesia memberikan pembekalan kepada Finalis Puteri Indonesia 2023. Sebanyak 44 finalis Puteri Indonesia melaksanakan pembekalan untuk memperluas wawasannya terkait pengawasan obat dan makanan di Indonesia dengan berdiskusi secara langsung bersama Kepala BPOM RI, Jumat (12/05/2023).





111.269

87.405 82.179

BAB 1

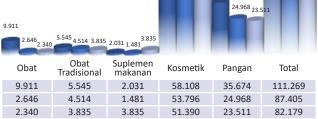
Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

Pengawasan Pre-market

Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, telah diterbitkan 87.405 keputusan dan 82.179 persetujuan izin edar dari 111.269 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.





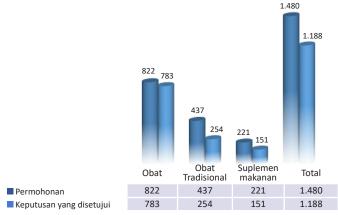
58.108

53.796 51.390

35 674

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dari 1.480 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 1.188 (80,27%) iklan.



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

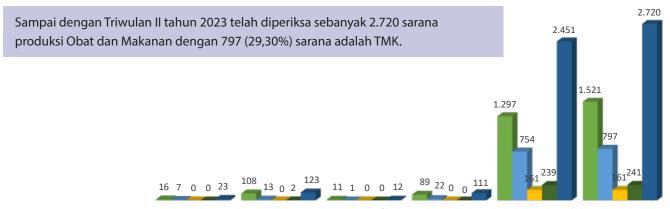


Pengawasan Post-market

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

	Obat	Obat Tradisional	Suplemen makanan	Kosmetik	Pangan	Total
■ MK	16	108	11	89	1.297	1.521
■ TMK	7	13	1	22	754	797
■ Tidak dapat dinilai	0	0	0	0	161	161
■Tutup	0	2	0	0	239	241
■ Total	23	123	12	111	2.451	2.720





Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

586

	Obat	Obat Tradisional	Suplemen makanan	Kosmetik	Pangan	Total
■MK	4.320	890	567	1.489	1.632	8.898
■ TMK	1.219	233	19	402	439	2.312
■ Tidak dapat dinilai	0	2	0	0	0	2
■ Tutup	0	0	0	0	60	60
■ Total	5.539	1.125	586	1.891	2.131	11.272

Sampling dan Pengujian Laboratorium

a. Targeted

	Metode Sam- pling	Jumlah sam- pling	TMK		ТМК			nlah Hasil uji		Total TMS Belum		Jumlah Sam-	
Komoditi			TIE/ Ilegal/ Palsu	Keda- luarsa	rusak	Label / Penan- daan	sampel masuk Lab	Sampel yang diuji	MS	TMS*	yang diperiksa	selesai uji	pel Diperiksa dan Diuji Se- suai Standar
		(a)		(b)		(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Tageted	1.478	-	1	-	30	1.477	1.088	1.058	30	31	389	1.089
Obat tra- disional	Tageted	1.842	-	-	-	68	1.842	1.495	1.349	146	146	347	1.495
kuasi	Tageted	73	-	-	-	-	73	54	52	2	2	19	54
Suplemen Kesehatan	Tageted	566	-	-	-	8	566	458	436	22	22	108	458



Kosmetik	Tageted	3.699	1	-	-	246	3.698	2.953	2.712	241	242	745	2.954
Rokok	Tageted	128	-	-	-	8	128	-	-	-	-	128	-
Pangan	Tageted	5.845	2	2	-	442	5.841	4.744	4.256	488	492	1.097	4.748

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dari 13.631 sampel targeted yang disampling terdapat 10.798 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 935 (8,66%) sampel tidak memenuhi syarat.

b. Random

		Jumlah sam- pling	тмк		TMK Jumlah	Jumlah	Hasil uji		TaralTuc	Belum	Jumlah Sam-		
Komoditi	Metode Sam- pling		TIE/ Ilegal/ Palsu	Keda- luarsa	rusak	Label / Penan- daan	sampel masuk Lab	Sampel yang diuji	MS	TMS*	Total TMS yang diperiksa	selesai uji	pel Diperiksa dan Diuji Se- suai Standar
		(a)		(b)		(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Random	7.127	1	-	-	167	7.126	5.581	5.436	145	146	1.545	5.582
Obat tra- disional	Random	4.465	5	-	1	186	4.459	3.724	3.406	318	324	735	3.730
kuasi	Random	375	-	-	-	9	375	245	238	7	7	130	245
Suplemen Kesehatan	Random	1.230	-	-	-	17	1.230	1.014	930	84	84	216	1.014
Kosmetik	Random	8.850	5	2	-	512	8.843	7.111	6.709	402	409	1.732	7.118
Pangan	Random	5.306	3	-	1	429	5.302	4.203	3.825	378	382	1.099	4.207

Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dari 27.353 sampel random yang disampling terdapat 21.896 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 1.352 (6,27%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan: MS = Memenuhi Syarat TMS = Tidak Memenuhi Syarat TIE = Tanpa izin Edar Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan I 2023



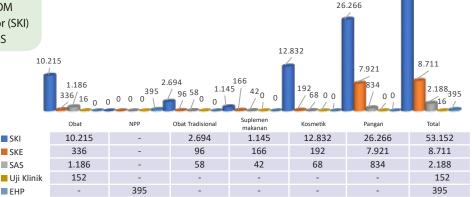
53.152

Sertifikasi

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (Special Access Scheme), Uji Klinik,

dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 telah diterbitkan 53.152 SKI, 8.711 SKE, 2.188 SAS, 152 Uji Klinik, dan 395 AHP Obat dan Makanan.

Keterangan: * Termasuk Kuasi

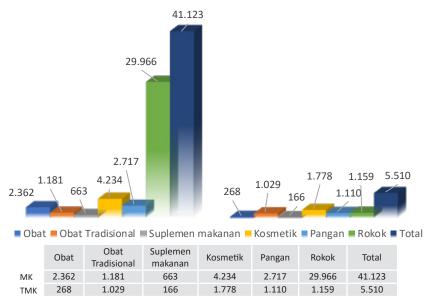


Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

Pengawasan Iklan

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan leaflet/brosur. Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dari 46.633 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 5.510 (11,82%) iklan tidak memenuhi ketentuan.





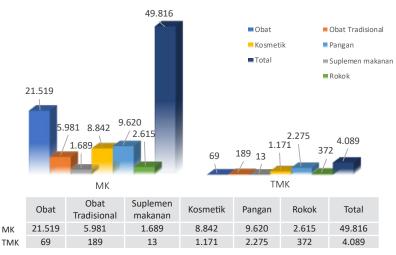
Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan



Pengawasan Label

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dari 53.905 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 4.089 atau sekitar 7,59% label tidak memenuhi ketentuan.

Keterangan: * Termasuk Kuasi



Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmokologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjut	%
Obat	6.012	4.758	79,14
Obat Tradisional	6	6	100,00
Suplemen Kesehatan	8	8	100,00
Kosmetik	282	266	94,33

Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping



BAB 2

Penindakan di Bidang Obat dan Maka<u>nan</u>

1. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, Badan POM menyusun aplikasi peta rawan kasus, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Sampai dengan Triwulan II 2023, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan yang aktual sebanyak 1522 kasus yang terdiri dari 496 kasus terkait obat, 360 kasus terkait obat tradisional, 7 kasus suplemen kesehatan, 530 kasus terkait kosmetik dan 129 kasus terkait komoditi pangan.



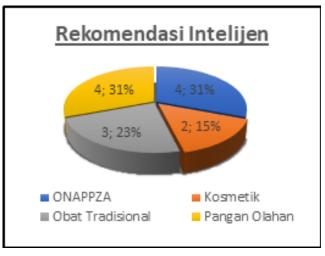
Gambar 8. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan



2. Hasil Operasi Intelijen

Peran Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan mayarakat Indonesia. Salah satu upaya Badan POM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik di premarket maupun postmarket. Kegiatan/ operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagi daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPPZA), obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan saksi administrasi maupun pro justicia.

Sampai dengan triwulan II, dari pelaksanaan kegiatan intelijen 83 laporan informasi yang terdiri dari 24 terkait kasus ONAPPZA, 10 terkait kasus obat tradisional, 16 kasus kosmetik, 5 kasus suplemen kesehatan dan 25 kasus pangan olahan. Sedangan dari pelaksanaan operasi intelijen tersusun



Gambar 9. Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan Berdasarkan Komoditi s.d Triwulan II 2023

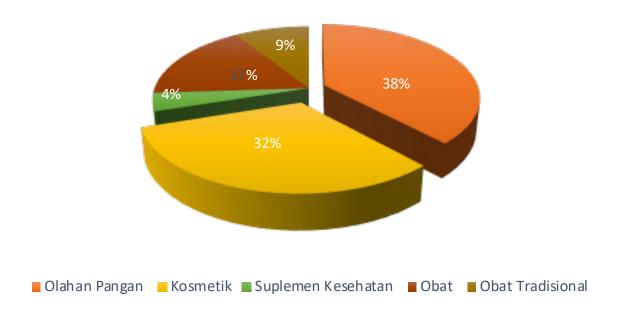
7 laporan intelijen. Dari seluruh rangkaian kegiatan dan operasi intelijen tersebut telah dihasilkan 13 rekomendasi intelijen dengan 4 kasus ONAPPZA, 2 kasus kosmetik, 3 kasus obat tradisional dan 4 kasus pangan olahan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi.



3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, Badan POM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk obat dan makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan II tahun 2023, ditemukan sebanyak 185.848 link yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan

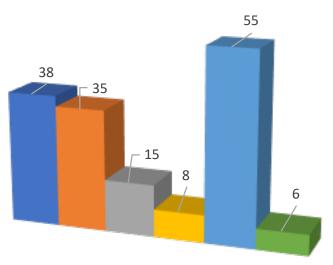


Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan II 2023



4. Hasil Penyidikan Obat dan Makanan

s.d. TW II 2023



Gambar 11. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan s.d Triwulan II 2023

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).
Sampai dengan triwulan II tahun 2023, PPNS
Badan POM telah menindaklanjuti 151 perkara
dengan pro Justitia. Sebanyak 38 perkara masih
dalam tahap SPDP, 35 perkara pada tahap
I, 15 perkara pada tahap P18/19, 8 perkara
pada tahap P21, 55 perkara pada tahap II
dan terdapat 6 perkara sudah mendapatkan
putusan pengadilan.



BAB 3

Penyusunan Standar/Regulasi/ Pedoman

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.

Obat

Pada tahun 2023 terdapat 17 peraturan/standar/pedoman obat yang diproses penyusunan. Daftar 17 peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

- 1. Revisi Peraturan Badan POM tentang Obat Pengembangan Baru (12,5%).
- 2. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Cara Regulatori Obat yang Baik (GRP) (100%).
- 3. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/ Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (Hanya Substansi Obat) (25%).
- 4. Penyusunan Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (Lampiran XVI) (100%).
- 5. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Metodologi Spesifik Zat Aktif Uji Bioekivalensi (50%).
- 6. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Tentang Verifikasi MA Obat Kimia (25%).
- 7. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Tentang Verifikasi Metode Analisis Mikrobiologi (0%) diganti menjadi Petunjuk Teknis Pemenuhan terhadap Kompendial Standar Mutu Untuk Penyusunan FI (33,33%)
- 8. Standar Mutu Untuk Penyusunan Farmakope Indonesia (50%).
- 9. Rancangan Standar Obat Non Kompendial (SONK) (66,67%).



- 10. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Tentang Pedoman Penilaian Mutu dan Kemasan Produk Radiofarmaka (25%).
- 11. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM No. 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang tidak memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label (25%).
- 12. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (25%).
- 13. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2018 Tentang tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (100%).
- 14. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis (25%).
- 15. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat (25%).
- 16. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring (25%).
- 17. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik (25%).

Obat Tradeisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun pada tahun 2023. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman tersebut sebagai berikut:

- 1. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional (40%).
- 2. Rancangan Pedoman Empiris Obat Tradisional (40%).
- 3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Uji Toksisitas Praklinik Secara In Vivo (Lampiran) (40%).



- 4. Pedoman Inovasi Teknologi dan Pendekatan Standardisasinya (40%).
- 5. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan (80%).
- 6. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan mengandung Probiotik (80%).
- 7. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Stabilitas Suplemen Kesehatan (80%).
- 8. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Cemaran Dalam Kosmetik (60%).
- 9. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika (60%).
- 10. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika (25%).
- 11. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik (60%).

Sampai dengan Triwulan II ini telah diselesaikan 58 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 85 hari kerja). Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari stakeholder.

Pangan

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang disusun pada tahun 2023. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

- 1. Pedoman Pengkajian Penetapan Kategori Pangan (30%).
- 2. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang Dalam Pangan Olahan (100%).



- 3. Penyusunan Naskah Kebijakan terkait Date Marking (Use-By dan Best-Before Date) Produk Pangan dalam rangka mendukung Produksi Berkelanjutan (50%).
- 4. Penyusunan Pedoman Meminimalkan Potensi AMR Bawaan Pangan Olahan (Foodborne AMR) (50%).
- 5. Penyusunan Pedoman/Kode Praktis Mitigasi Risiko terkait Cemaran (MCPDE-GE, BPA) (50%).
- 6. Penyusunan Pedoman Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu, dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan (50%).
- 7. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan (60%).
- 8. Penyusunan Pedoman Implementasi Regulasi Pangan Berasam Rendah untuk UMKM (67%).
- 9. Penetapan Informasi Nilai Gizi Pada Bagian Depan Label Yang Mudah Dipahami Masyarakat (FoPNL traffic light) (30%).
- 10. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan (50%).
- 11. Penyusunan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) (30%).

Badan POM juga menyusun kajian terkait pangan olahan. Sampai dengan triwulan II telah diselesaikan 62 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari stakeholder.



BAB 4

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Analisis kebijakan Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat penambahan sebanyak 1 topik kajian pada bulan Mei, sehingga jumlah total topik kajian menjadi 11 topik. Daftar 11 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II pada tahun 2023 sebagai berikut:

- 1. Pengukuran Indeks Kesaradaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (52%).
- 2. Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan (65%).
- 3. Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat (46%).
- 4. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan (65%).
- 5. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM (58%).
- 6. Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi (40%).
- 7. Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ Kefarmasian (58%).
- 8. Kajian Polutan Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan (48%).
- 9. Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan (65%).
- 10. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC) (70%).
- 11. Evaluasi Program Penataan dan Perkuatan UPT POM (43%)





BAB 5

Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

1. Metode Analisis yang Dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis (MA) Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar. Pengembangan metode analisis dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan untuk membuat kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan II telah dikembangkan 89 metode analisis.

2. Baku Pembanding yang dikembangkan

Pengembangan Baku Pembanding (BP) dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/ Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan II 2023 telah dikembangkan 30 baku pembanding.

3. Sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu

Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel lot release vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, terdapat 1180 sampel yang telah selesai diuji di laboratorium PPPOMN. Dari 1189 sampel yang telah selesai uji, sebanyak 1177 sampel yang telah selesai uji memenuhi ketentuan timeline sehingga persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 99,75%.



4. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang Dikalibrasi Sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, telah dilakukan kalibrasi terhadap 1.727 peralatan laboratorium.

5. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, sharing informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan Badan POM maupun eksternal sesuai lingkup pengujian/ keahlian. Pada tahun 2023, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 12 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, Badan POM telah berpartisipasi dalam 10 jejaring laboratorium.

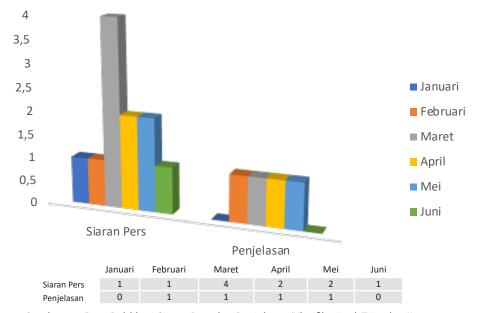




BAB 6

Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Pada triwulan I tahun 2023, Badan POM telah menerbitkan 11 siaran pers dan 4 penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Penerbitan siaran pers paling banyak terjadi di bulan Maret sebanyak 4 siaran pers dan 1 penjelasan/klarifikasi.



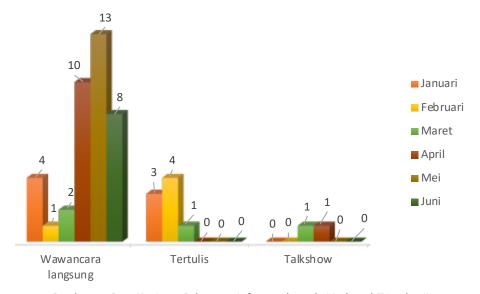
Gambar 12. Data Publikasi Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi s.d. Triwulan II 2023

Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas, antara lain obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum/kinerja. Topik yang paling sering dibahas sepanjang triwulan 2 tahun 2023 yaitu terkait pangan olahan (2 penjelasan/klarifikasi). Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui website dan media sosial Badan POM.



Badan POM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM melalui berita aktual yang diunggah melalui website resmi Badan POM dan disebarkan kepada media massa.

Tercatat sebanyak 46 berita aktual telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM sampai dengan triwulan II tahun 2023.



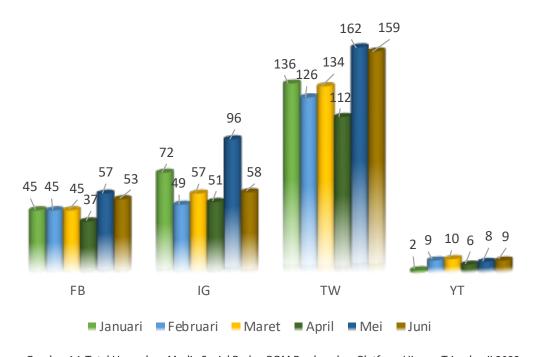
Gambar 13. Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan II 2023

Sepanjang triwulan II tahun 2023, Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara/talkshow serta pemberian jawaban tertulis. Dengan rincian kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan adalah 29 wawancara langsung, 16 jawaban tertulis dan 1 pemenuhan narasumber untuk program talkshow.

Pada triwulan II tahun 2023, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 platform media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube cukup aktif dengan rata-rata 2-3 unggahan konten per hari. Platform Twitter adalah platform yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 433 tweets dibandingkan dengan 3 platform media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi



kedua adalah Instagram dengan 205 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 147 unggahan, serta Youtube sebanyak 23 unggahan. Sedangkan total unggahan media sosial selama triwulan II 2023 di berbagai platform sebagai berikut:

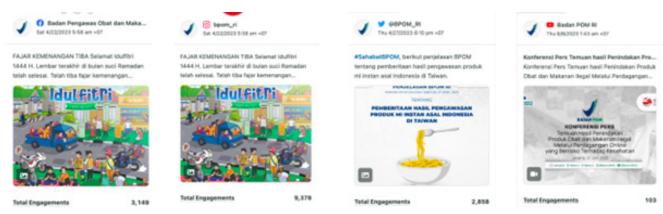


Gambar 14. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform Hingga Triwulan II 2023

Secara garis besar, total unggahan selama triwulan I 2023 di berbagai platform adalah 1538 konten. Rincian jumlah unggahan per bulannya adalah 255 unggahan di bulan Januari, 229 unggahan di bulan Februari, 246 unggahan di bulan Maret, 206 unggahan di bulan April, 323 unggahan di bulan Mei, dan 279 unggahan di bulan Juni.

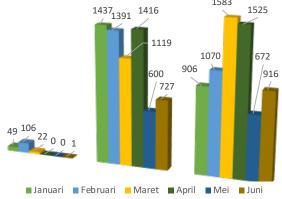
Top engagement content terkait Badan POM pada keempat platform dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 15. Top engagement content terkait Badan POM pada platform Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan II 2023

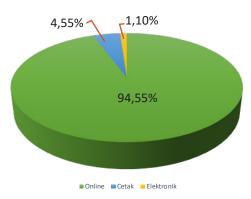
Pemberitaan terkait Obat dan Makanan dan Badan POM sampai dengan triwulan II tahun 2023 mencapai 13.540 pemberitaan. Dari jumlah tersebut, berita bertonasi netral sebanyak 6.690 pemberitaan (49,41%) sementara berita bertonasi positif sebanyak 6.672 pemberitaan (49,28%) dan berita bertonasi negatif sebanyak 178 pemberitaan (1,31%). Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik Obat dan Makanan yang tidak mengutip Badan POM.



Gambar 16. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan hingga Triwulan II 2023



Tingginya pemberitaan positif dan netral pada Maret 2023 karena BPOM melalui Balai Besar/ Balai/Loka POM mulai intensif melakukan pengawasan pangan selama Ramadhan dan jelang Idul Fitri 2023. Pada triwulan II, pemberitaan positif didominasi oleh penjelasan BPOM terkait isu produk mi instan asal Indonesia di Taiwan. Pemberitaan netral didominasi oleh perkembangan kasus mengenai penarikan mi instan asal Indonesia di Taiwan. Pemberitaan negatif mengenai pro kontra mengenai pelabelan BPA Free.



Gambar 17. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Pada Triwulan II 2023

Berdasarkan jenis media, media yang memberitakan terkait Badan POM dan isu Obat dan Makanan hampir seluruhnya berasal dari media online sebesar 94,35% (12.775 berita), sedangkan media cetak 4,55% (616 berita) dan media elektronik 1,10% (149 berita). Sampai dengan triwulan II 2023 terdapat berbagai topik pemberitaan yang terkait dengan Badan POM. Topik pemberitaan di bulan Januari didominasi oleh Kementerian Kesehatan akan memulai vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum dan Bareskrim Polri terus

mengembangkan penyelidikan mengenai produsen yang diduga melakukan pelanggaran pada produksi sirop obat. Pada bulan Februari, pemberitaan didominasi oleh konferensi pers Badan POM mengenai Langkah Antisipatif Badan POM Terhadap Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak pada tanggal 8 Februari 2023 yang menunjukkan hasil pengujian Badan POM pada sejumlah sirop obat Praxion masih aman digunakan. Pada bulan Maret, Badan POM gerebek sebuah pabrik yang diduga memproduksi kosmetik dan produk



kecantikan ilegal di kawasan pergudangan Elang Laut Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara. Pada April, pemberitaan didominasi oleh penjelasan terkait hasil pengawasan produk mi instan asal Indonesia di Taiwan. BPOM menerbitkan penjelasan terkait regulasi Batas Maksimal Residu (BMR) 2-CE melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida. Selain itu, terdapat pemberitaan terkait klarifikasi produsen soal mi instan Taiwan. Pada Mei, pemberitaan didominasi oleh penerbitan EUA untuk vaksin booster Indovac dan pembongkaran kasus obat palsu oleh Polri. Pihak Bio Farma menyatakan BPOM telah memberikan EUA vaksin Indovac untuk vaksin penguat bagi warga berusia 18 tahun ke atas yang mendapat vaksin primer Pfizer. Pemberitaan terkait mi instan Indonesia di Taiwan juga masih muncul pada bulan ini. Pada Juni, pemberitaan didominasi oleh konferensi pers BPOM terkait penindakan obat ilegal. BPOM menemukan dan menyita sejumlah barang bukti sediaan farmasi illegal berupa obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan ilegal yang tidak memiliki izin edar sebanyak 700 item (22.552 buah).



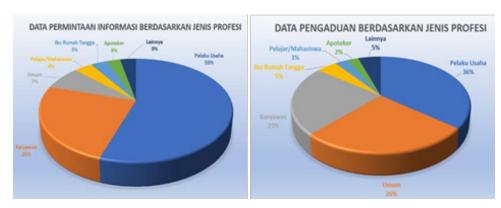
Gambar 18. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023



Sampai dengan triwulan II tahun 2023, terdapat 49 permintaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dari 49 permintaan informasi yang ditindaklanjuti oleh Badan POM, 45 permintaan informasi (92%) dikabulkan sepenuhnya, 4 permintaan informasi (8%) yang dikabulkan sebagian dan tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian (tidak lebih dari 17

hari kerja).

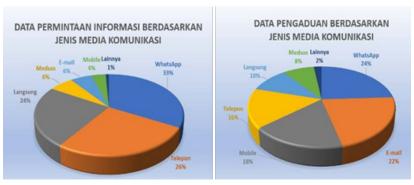
Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat sampai dengan triwulan II 2023, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 73 Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta Contact Center HALOBPOM sebanyak 27.857 layanan, terdiri dari 26.780 (96,13%) layanan permintaan informasi dan 1.077 (3,87%) layanan pengaduan.



Gambar 19. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

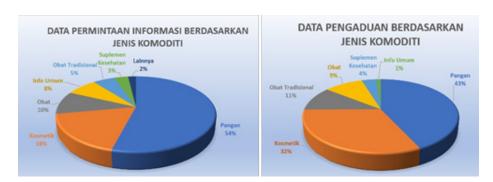
Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 14.756 (55,1%) layanan dan karyawan sebanyak 6.579 (24,56%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 386 (35,84%) layanan dan umum sebanyak 283 (26,27%) layanan.





Gambar 20. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 8.835 (33%) layanan dan telepon sebanyak 7.103 (26,52%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui Whatsapp sebanyak 260 (24,14%) layanan dan email sebanyak 237 (22%) layanan.

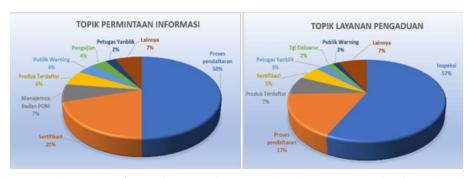


Gambar 21. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 14.489 (54,1%) layanan dan kosmetik sebanyak 4.815 (17,98%) layanan. Adapun

komoditi yang banyak diadukan yaitu pangan sebanyak 460 (42,71%) layanan dan kosmetik sebanyak 340 (31,57%) layanan.





Gambar 22. Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 13.387 (50%) layanan dan proses sertifikasi sebanyak 5.392 (20,13%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang maintenance aplikasi pelayanan publik BPOM, informasi magang/penelitian, informasi nomor kontak dan alamat unit di Badan POM, produk terdaftar/legalitas produk, pengujian

laboratorium, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, konsultasi pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia, dan tanggal kedaluwarsa produk. Adapun topik pengaduan yang banyak diadukan yaitu tentang inspeksi seperti pengaduan terhadap produk Obat dan Makanan ilegal ataupun tidak sesuai ketentuan sebanyak 614 (57%) layanan dan keluhan terkait proses pendaftaran sebanyak 188 (17,45%) layanan.





Digitalisasi Pelayanan Publik

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital (2D Barcode)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital Tahun 2023 dilakukan penyempurnaan melalui pelaksanaan pengadaan, sistem TTAC akan dilengkapi dengan informasi e-labeling (informasi penandaan produk secara digital) mendukung informasi produk obat secara digital. Kegiatan ini juga didukung dengan kinerja melalui strategi percepatan implementasi melalui pendampingan pelaku usaha yang dilakukan oleh BPOM pada tahun 2023, antara lain dengan:

a. melakukan desk konsultasi baik secara tatap muka sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan 12 (dua belas) Pelaku Usaha yang terdiri dari PT Bina San Prima, PT. Takeda Indonesia, PT Konimex Indonesia, PT Eisai Indonesia, Korean United Pharm, PT Dion, PT. Astrazeneca Indonesia, PT Alcon Tbk, PT. Actavis Indonesia, PT Darya Varia laboratories, PT. Fresensius Kabi dan PT Combiphar Indonesia

b. melakukan helpdesk teknis dan substansi melalui email sebanyak 120 laporan yang ditindaklanjuti.

Dalam rangka percepatan implementasi 2D Barcode, Badan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha serta sosialisasi kepada masyarakat. Selama triwulan I 2023, strategi pendampingan pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan POM antara lain dengan melakukan desk konsultasi baik secara tatap muka dengan 10 pelaku usaha maupun melalui email dan Whatsapp dengan jumlah laporan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 80 laporan.

2. BPOM Mobile

BPOM Mobile merupakan aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat dalam memverifikasi produk, hanya dengan melakukan pemindaian 2D Barcode yang ada pada kemasan, memberikan kemudahan akses berita up to date serta kemudahan akses informasi dan pengaduan terhadap produk Obat dan Makanan. Inovasi teknologi dalam pengawasan Obat dan makanan melalui



pembangunan aplikasi BPOM Mobile dimulai sejak 2018. Aktivitas BPOM Mobile dari 2018 – hingga 30 Juni 2023 sebagai berikut:





Gambar 23. Aktivitas pada BPOM Mobile Periode 2018 – 30 Juni 2023

3. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu

Pada triwulan II, dilaksanakan sosialisasi
Update Form Penandaan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi pada 21
Juni 2023 secara daring. Pengembangan SIPT
ini menggunakan form yang jauh lebih singkat
dan efisien sehingga diharapkan waktu evaluasi
yang dilakukan bisa lebih cepat. Migrasi data
dilakukan pada Juni 2023, dan dapat mulai
diimplementasi awal Juli 2023
Sejalan dengan hal di atas, dilaksanakan
pengembangan form pengawasan iklan
kosmetik dan pangan mengakomodir
kebutuhan unit dan user. Monitoring dan
evaluasi berkala hasil pengembangan
dilaksanakan melalui pembahasan rutin

bersama unit, UPT dan pengembang. Selain itu juga sedang dilakukan integrasi dengan e-sertifikasi, penyempurnaan dashboard untuk mempermudah monitoring oleh user.
Pusdatin mendukung penyempurnaan konsep baru Regionalisasi Laboratorium dan terus mengawal pelaksanaan regionalisasi laboratorium serta melakukan monitoring evaluasi pada implementasi regionalisasi di SIPT. Mekanisme entri hasil uji regionalisasi di SIPT masih relevan dan bisa mengakomodir perubahan konsep tersebut, adapun Tools Monev akan menyesuaikan pada formula yang masih dalam tahapan pembahasan.
Pendampingan serta penanganan kendala



pada aplikasi SIPT terus dilakukan, baik melalui tools Help Pusdatin (ITSM) maupun media komunikasi daring / chat.

Untuk peningkatan berkelanjutan pada sistem pelaporan pengawasan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mengundang Pusdatin sebagai narasumber pada tanggal 16 Juni 2023 dalam Rapat Brainstorming Pengembangan Modul Pemeriksaan Sarana Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan pada Aplikasi SIPT, dan dalam rangka menindaklanjuti kendala serta mengoptimalkan pelaporan hasil sampling dan pengujian melalui SIPT, Pusdatin bersama tim Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA melaksanakan monitoring dan evaluasi ke UPT BPOM dimulai dari BBPOM di Jakarta pada tanggal 20-22 Juni 2023.





Pemanfaatan SIPT 2023

Nasional, Seluruh Komoditi.

pemeriksaan sarana

target 28,733 data

21.073 data

sampling pengujian rutin

target 70,005 data

46.317 sampel

pengawasan iklan

15.309 data

penandaan

48.906 data

"Date ditarik per 30 Juni 2023 dari SIPT



4. Aplikasi Kelembagaan (Evortala)

Aplikasi evortala menu penilaian UPP telah melewati tahap User Acceptance Test (UAT) sehingga dapat diimplementasikan mendukung penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sejak 28 Mei 2023 hingga 21 Juni 2023 baik pengisian form 01 oleh UPT, pengisian survei oleh masyarakat (form F03), serta Penilaian terhadap form F01 oleh tim penilai (melalui F02).

Melanjutkan rencana adopsi aplikasi evortala oleh Kementerian PANRB sehingga pada tanggal 27 Juni 2023 Kementerian PANRB menginisiasi pertemuan daring guna sharing knowledge Aplikasi Evortala terkait Pelaksanaan PEKPPP yang telah rampung. Dari hasil pertemuan direncanakan tindak lanjut berupa kloning aplikasi oleh Kementerian PANRB dengan teknis kloning akan dilakukan pada diskusi selanjutnya.



Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, telah ditetapkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Badan POM, 50 (Lima Puluh) Keputusan Kepala Badan POM, 41 (Empat Puluh Satu) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (Satu) Rancangan Undang-Undang dan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1 Judul Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

3 Judul Rancangan Peraturan Pemerintah

- 1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan POM
- 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- 3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

Judul Peraturan Badan POM

- 1. Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Bets/ Lot Vaksin.
- 2. Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengkajian Keamanan dan/atau Mutu Obat dan Bahan Obat Terhadap Cemaran Nitrosamin

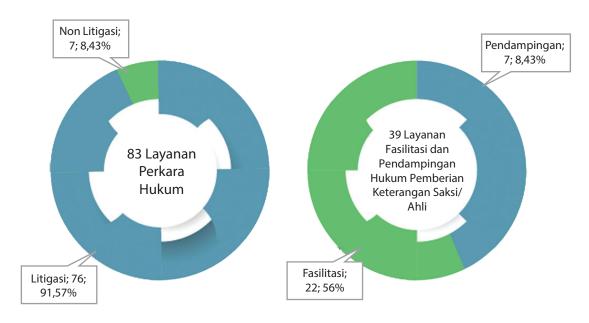


- 3. Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- 4. Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 5. Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 6. Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 7. Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi
- 8. Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antibakteri
- 9. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penilaian Mutu Produk Obat Inhalasi dan Nasal
- 10. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan
- 11. Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023
- 12. Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik
- 13. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kategori Pangan

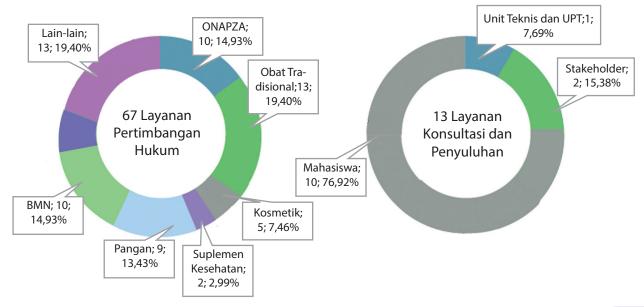


Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Setiap instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Salah satu aspek hukum adalah layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jumlah dan jenis layanan advokasi hukum yang sudah dilakukan oleh Badan POM sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada berikut.







Gambar 24. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan II 2023



Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi, telah dilakukan reviu atas kriteria klasifikasi UPT BPOM yang menyederhanakan tipologi UPT BPOM yang semula 4 (empat) klasifikasi menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Disamping itu, penataan UPT BPOM dilakukan melalui evaluasi kelembagaan UPT BPOM dan diperoleh hasil peningkatan 8 Loka POM menjadi Balai POM, pembentukan 3 Loka POM baru, serta perubahan nama, lokasi, dan wilayah kerja 45 UPT BPOM. Hasil evaluasi dan penataan UPT BPOM ini telah mendapatkan persetujuan tertulis Izin Prinsip Menteri PANRB nomor B/559/M.KT.01/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Penataan UPT BPOM.

Sehubungan dengan terdapat perubahan Road Map RB nasional tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, BPOM telah melakukan serangkaian pembahasan Perubahan Road Map RB BPOM Tahun 2023-2024 dan Rencana Aksi RB BPOM Tahun 2023. Pembahasan ini melibatkan Kementerian PANRB, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh UPT BPOM, serta Tim RB BPOM menghasilkan 2 (dua) Keputusan Kepala BPOM sebagai berikut:

- Keputusan Kepala BPOM Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tim RB BPOM.
- Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map RB BPOM Tahun 2020-2024.

2. Tata Laksana

a. Sosialisasi Hasil Tinjau Ulang Proses Bisnis BPOM

Menindaklanjuti Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis di Instansi Pemerintah, BPOM telah melakukan tinjau ulang proses bisnis dan SOP Makro untuk tahun 2023 yang dimulai dari Minggu II Januari sampai Minggu IV Februari 2023.



Tinjau ulang proses bisnis merujuk pada prinsip SERA (Simplification, Elimination, Re-Engineering, dan Automation) sehingga terdapat perubahan berupa penambahan, penyederhanaan, atau penggabungan pada bisnis proses, subbisnis proses atau SOP Makro dari yang sebelumnya sudah ada menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula	Menjadi
Peta Proses Bisnis	16	16
Peta Subproses Bisnis	37	37
Peta Lintas Fungsi	54	54
SOP Makro	96	94

Sosialisasi hasil tinjau ulang Proses Bisnis dan SOP Makro dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023 secara daring melalui zoom meeting. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama dan dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta Manajemen Representatif dan Auditor Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Dalam kegiatan sosialisasi disampaikan seluruh hasil tinjau ulang proses bisnis dan SOP Makro dan sosialisasi Petunjuk Teknis Audit Internal BPOM yang telah mengimplementasikan integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO 37001:2016 pada

- Manual Organisasi BPOM.
- b. Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM
 Dalam pelaksanaan kebijakan mutu, BPOM
 berkomitmen untuk melindungi masyarakat
 dari Obat dan Makanan yang berisiko
 terhadap kesehatan sesuai ketentuan
 dan secara terus-menerus meningkatkan
 pengawasan serta memberikan pelayanan
 kepada seluruh pemangku kepentingan,
 dengan menerapkan prinsip-prinsip
 pemerintahan yang baik dan pemerintahan
 yang bersih.

Untuk menjamin komitmen tersebut dapat terlaksana maka Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM harus memastikan pegawai memahami klausul-klausul pada ISO 9001:2015 dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan awareness QMS ISO 9001:2015 memiliki peran penting dalam peningkatan kompetensi pegawai terkait Sistem Manajemen Mutu QMS ISO 9001:2015. Pelaksanaan kegiatan Awareness ISO 9001:2015 BPOM Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi Manajemen Representatif, Tim Penjamin Risiko, dan Tim



Auditor Internal seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM.

Untuk efektivitas capaian kegiatan, awareness QMS ISO 9001:2015 dilaksanakan secara luring dalam dua kali pelaksanaan yaitu pada tanggal 3 s.d. 4 Mei 2023 dengan peserta Unit Pusat dan UPT wilayah barat dan pada tanggal 10 s.d 11 Mei 2023 dengan peserta UPT wilayah timur.

Pelaksanaan Awareness ISO 9001:2015 BPOM tahun 2023 dihadiri Tim Koordinator Manajemen Representatif dan Manajemen Representatif seluruh Unit Kerja di lingkungan BPOM. Pada tahun ini materi Awareness ISO 9001:2015 lebih ditekankan pada implementasi untuk klausul klausul 7.1, klausul 7.5, klausul 8.1, klausul 8.5, dan klausul 9.1 dalam ISO 9001:2015 sebagai tindak lanjut pelaksanaan audit internal dan audit eksternal tahun 2023. Dengan penekanan pada klausul tersebut, pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2016 diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak ditemukan lagi ketidaksesuaian pada klausul-klausul yang berpotensi adanya temuan ketidaksesuaian.

Disamping itu, dalam rangka membangun penerapan ISO 37001:2016,

pada kegiatan awareness juga diberikan pemaparan mengenai pengenalan ISO 37001:2016 dengan narasumber dari Badan Standardisasi Nasional. Kegiatan awareness juga dilengkapi dengan penyampaian petunjuk teknis Audit Internal, petunjuk teknis manajemen risiko serta Penyusunan SOP Mikro setelah Penyederhanaan Birokrasi. Setelah kegiatan ini seluruh peserta diharapkan dapat melakukan sosialisasi kembali di lingkungan Unit Kerja masing-masing untuk persamaan persepsi dan perbaikan penerapan QMS ISO 9001:2015.

c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) QMS ISO9001:2015 Unit Kerja di Lingkungan BPOM

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundangundangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM



dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM.

Sesuai persyaratan ISO 9001:2015 klausul 9.3. Management Review, Rapat Tinjauan Manajemen bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi. Oleh karena itu, telah disampaikan surat Sekretaris Utama Nomor B-OT.02.03.2.22.06.23.410 tanggal 7 Juni 2023 tentang Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai/Loka POM sebagai dasar pelaksanaan RTM di seluruh unit kerja.



Kerjasama Internasional

Diplomasi dengan Saudi FDA, Perjuangkan Akses Produk Pangan Indonesia

Badan POM telah melaksanakan kunjungan kerja ke Arab Saudi pada tanggal 4-8 April 2023. Arab Saudi merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan POM bahkan telah memiliki kerjasama bilateral dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan otoritas regulator terkait obat dan makanan di Arab Saudi yaitu Saudi FDA.

Pada kunjungan kerja ke Arab Saudi ini, Badan POM sebagai Competent Authority ekspor pangan mengandung hewan Indonesia ke Arab Saudi memimpin pertemuan antara Pemerintah RI dengan Otoritas Pengawas Obat dan Makanan Arab Saudi, yaitu Saudi FDA (SFDA) untuk membahas kemudahan akses (ease of access) pangan mengandung hewan dari Indonesia bagi konsumsi para jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi. Delegasi Pemerintah RI terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Luar Negeri, BPOM dan didampingi Duta Besar RI Riyadh.



Pada pertemuan, kedua pihak sepakat untuk mendorong perkembangan perdagangan kedua negara untuk produk Obat dan dan Makanan secara luas, tidak hanya untuk keperluan haji dan umroh namun untuk pasar kedua negara. Untuk itu, SFDA akan segera menjadwal on-site inspection terhadap Unit Pengolahan Ikan produk perikanan



Indonesia untuk mempercepat proses perizinan ekspor produk ikan Indonesia ke Arab Saudi.

Badan POM juga turut mengusulkan pembentukan Kesepakatan Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangement) di bidang keamanan pangan antara kedua lembaga. Onsite Inspection SFDA ke sarana pangan Indonesia akan menjadi dasar terhadap diberlakukannya mutual recognition, sehingga untuk ekspor pangan kedepannya SFDA tidak perlu melakukan on-site inspection kembali namun cukup dilakukan oleh BPOM sebagai Competent Authority yang melakukan inspeksi kepada sarana pangan Indonesia.

Berkaitan pelarangan impor (*import ban*) sementara untuk daging unggas, telur, dan produk turunannya dari Indonesia, SFDA mengkonfirmasi dapat mengangkat pelarangan (ban) tersebut jika Indonesia telah memperbaharui status bebas AI kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) berdasarkan status bebas AI by zonasi atau *by city*.

Lebih lanjut, SFDA menkonfirmasi bahwa sudah tidak terdapat pelarangan impor (*import ban*) daging ruminansia dan produk olahannya dari Indonesia ke Arab Saudi, namun harus berasal dari sarana/establishment yang telah diregistrasi oleh SFDA.





Kedua pihak juga sepakat untuk melanjutkan kerja sama dan memperpanjang MoU kerjasama antara BPOM dan SFDA. Dalam kaitan ini, SFDA mengapresiasi kekuatan BPOM dalam pengawasan vaksin dan produk biologi dan mengusulkan kolaborasi berkelanjutan dalam bidang pelatihan laboratorium obat dan vaksin yang akan diberikan oleh Badan POM kepada SFDA. BPOM juga berjanji akan mendampingi SPFDA terhadap proses keanggotaan SFDA untuk bergabung dalam Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S).

2. The 2nd ASEAN-JAPAN Risk Management Plan (RMP) Symposium and Seminar

Badan POM berkolaborasi dengan Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA-Jepang), Universitas Indonesia dan Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) menyelenggarakan Simposium dan Seminar tentang Risk Management Plan (RMP) pada 24-26 Mei 2023 di Jakarta.

Badan POM, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA Jepang), dan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, didukung oleh ASEAN Secretariat dengan pendanaan dari Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) bekerja sama dalam mengadakan ASEAN-Japan Risk Management Plan (RMP) Symposium and Seminar. Project tersebut merupakan lanjutan dari kerjasama antara PMDA dan Pharmaceutical Product Working Group (PPWG) di bawah kerangka the ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ).



Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas regulator di ASEAN menuju harmonisasi di kawasan Asia Tenggara terkait *Risk Management Plan* (RMP). Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antara regulator, industri obat, dan akademisi, khususnya dalam pemastian keamanan obat melalui implementasi RMP.



3. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Antara BPOM dengan AIFAESA, I.P, Republik Demokratik TIMOR-LESTE

BPOM melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Inspeksi dan Pengawasan Kegiatan Ekonomi, Sanitasi, dan Pangan atau Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, Institusi Publik (AIFAESA I.P.) Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) tentang Kerja Sama Teknik di Bidang Pengawasan Pangan pada Rabu, 21 Juni 2023 di Kantor BPOM, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito dan Inspektur Jenderal AIFAESA, I.P., Ernesto Monteiro.

Pembentukan MoU ini bertujuan untuk semakin memperkuat jaminan keamanan pangan yang dibangun oleh kedua negara, yaitu Indonesia dan RDTL. MoU tersebut mencakup (1) pengembangan sistem pengawasan pangan; (2) pertukaran informasi tentang kebijakan dan strategi pengawasan pangan; (3) penyediaan bantuan dalam melakukan penilaian dan merumuskan kebijakan nasional serta pengawasan di bidang pangan; (4) pengembangan sumber daya manusia di AIFAESA I.P., dan (5) penguatan koordinasi pengawasan pangan di perbatasan antara kedua negara.





Kerja sama BPOM dengan AIFAESA I.P., RDTL telah dimulai tahun 2018 melalui Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) di bidang pengawasan pangan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang efektif bagi inspektur pangan, juga berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai sistem manajemen laboratorium dan instrumen dengan AIFAESA, I.P. melalui benchmarking, pertukaran best practice, pendampingan, dan pelatihan dalam pengujian.

MoU ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah RI dalam pemberian hibah peralatan laboratorium kepada Pemerintah RDTL dengan anggaran Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). BPOM juga berkomitmen untuk terus membantu memperkuat sistem pengawasan pangan di RDTL serta menjadikan BPOM sebagai mitra terpercaya bagi AIFAESA, I.P.





Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan II ini telah dilaksanakan menyelenggarakan kegiatan Diskusi Pengembangan Pola Karier BPOM dengan Kementerian PAN RB untuk memaksimalkan langkah konkret dari penerapan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier PNS. Selai itu telah dilakukan kegiatan rekonsiliasi Nilai PPPK dengan Kementerian PAN RB untuk memverifikasi hasil seleksi PPPK Tenaga Teknis Formasi 2022.

Dalam rangka impementasi Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan secara berkelanjutan melalui Upaya internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasi serta dalam rangka mendukung manajemen perubahan Badan POM telah diselenggarakan Focus Group Discussion terkait diseminasi rancangan roadmap yang telah disusun dan penyusunan rencana aksi dengan metode hybrid yang dihadiri perwakilan Agent of Change (AOC), Pemimpin Perubahan, serta Pegawai yang

menangani pengelolaan Disiplinserta Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan makanan.

2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Aplikasi Integrated Development and Training Information System (IDEAS) merupakan platform pengembangan kompetensi digital terintegrasi di Badan POM. Aplikasi tersebut memiliki fitur online shopping training atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelanjaran secara online kapanpun dan di manapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Fitur lain yang dimiliki aplikasi IDEAS adalah webinar/diskusi online yang dapat diikuti oleh pegawai Badan POM dengan narasumber yang berasal dari internal Badan POM maupun eksternal. Keunggulan lain dari IDEAS berupa penerbitan sertifikat online di



mana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan https://siasn.pom.go.id.

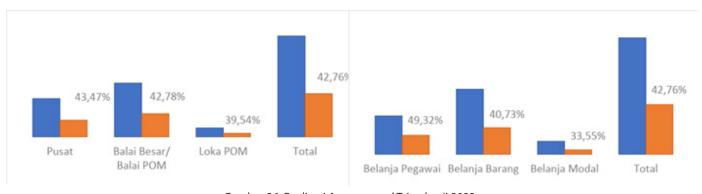
Badan POM juga memiliki aplikasi SIMPHONI yang merupakan platform knowledge management. Aplikasi SIMPHONI memungkinkan pegawai atau Unit BPOM untuk sharing data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau unit kerja lain. Pada triwulan Il 2023, sebanyak 399 data/informasi/ pengetahuan telah publish dan dikelola dalam aplikasi SIMPHONI.



Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan II 2023

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.215.929.014.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM.

Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2023 sebesar, Rp947.544.492.001,- (42,76%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp366.067.861.464,- ,realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp505.696.177.362,- ,dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp75.780.453.175,-.



Gambar 26. Realisasi Anggaran s.d Triwulan II 2023



Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Pusat	842.184.671.000	366.067.861.464	43,47%
Balai Besar/ Balai POM	1.182.091.610.000	505.696.177.362	42,78%
Loka POM	191.652.733.000	75.780.453.175	39,54%
Total	2.215.929.014.000	947.544.492.001	42,76%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	Pusat	842.184.671.000	366.067.861.464	43,47%
Realisasi	Balai Besar/ Balai POM	1.182.091.610.000	505.696.177.362	42,78%
%	Loka POM	191.652.733.000	75.780.453.175	39,54%
	Total	2.215.929.014.000	947.544.492.001	42,76%



Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2023. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran

kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifkasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebagaimana terlampir pada buku ini.

Penutup

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam

rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta continuous Improvement.



LAMPIRAN 1

Capaian Rencana Kerja Pemerintah Badan Pengawas Obat dan Makanan Sampai dengan Juni



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program	Indeks Pengawasan Obat	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Pengawasan Obat dan	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Makanan	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	93,3	%	32,69	35,04%
		Indeks Pengawasan Makanan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	275	Kab/ Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	73	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.1	Pengawasan Obat dan	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	93,5	%	94,47	101,04%
	Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	84,2	%	91,15	108,25%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing- masing wilayah kerja UPT BPOM	89,5	%	92,45	103,30%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	79	%	89,40	113,16%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	%	88,14	97,93%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	90,35	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	93	%	92,03	98,96%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	70	%	59,84	85,49%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing- masing wilayah kerja UPT BPOM	94	%	92,71	98,63%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	65	%	65,59	100,91%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing -masing wilayah kerja UPT BPOM	68	%	74,09	108,96%
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4,39	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UMKM yang memenuhi stan- dar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	%	52	65,82%
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	50,19	50,19%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	52,14	52,14%
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	77	%	48,80	63,38%
		Indeks RB UPT	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP UPT	83	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium/GLP	86	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	Indeks	2,80	112,00%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,5	Nilai	71,58	75,75%
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	88	%	42,86	48,70%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	85	%	100	117,65%
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	90	%	92,12	102,36%
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	94	%	100	106,38%
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	86,9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2,5	Indeks	3	120,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	91	Nilai	75	82,42%
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas	83	%	85,71	103,27%
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	83	%	85,54	103,06%
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	83	%	85,71	103,27%
		Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman	70	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	81,8	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2,5	Indeks	3	120,00%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	91	%	75	82,42%
1.4	Pengawasan Obat	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	86	%	88,72	103,16%
	Tradisional, dan Suplemen	Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	77	%	77,35	100,45%
	Kesehatan	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan OT dan SK oleh UPT	86	%	100	116,28%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	83	%	94,25	113,55%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78	%	80,67	103,42%
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	95	%	100	105,26%
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	63	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	91	%	91,39	100,43%
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4,55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	2,5	Indeks	3	120,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat PengawasanObat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99	%	99	100,00%
1.5	Pengawasan Produksi	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	76	%	63,21	83,17%
	Pangan Olahan	Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	16	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	65	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan pelaksanaan pengawasan produksi pangan olahan oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	92	%	92,31	100,34%
		Persentase koordinasi Pengawasan Produksi Pangan fortifikasi yang dilaksanakan	85	%	35	41,18%
		Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Pengawasan Produksi yang diberikan	87	%	87	100,00%
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	254	Kab/ Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	91	%	86,89	95,48%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	4,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85,25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	2,5	Indeks	2,50	100,00%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	92	%	95	103,26%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase sarana Kosmetik yang memenuhi ketentuan	88	%	79,46	90,30%
		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	88	%	79,03	89,81%
		Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/ Balai POM/Loka POM	86	%	100	116,28%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	88	%	89,52	101,73%
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	84	%	85,64	101,95%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	%	94,33	103,66%
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	83	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93	%	93,05	100,05%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	2,5	Indeks	2,50	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100	%	88	88,00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Obat, Narkotika,	Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik distribusi obat	91	Indeks	Triwulan III	Triwulan III
	Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	87	%	87	100,00%
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	87	%	100	114,94%
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dana pelayanan obat oleh Balai	81	%	79,41	98,04%
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	94	%	95,31	101,39%
		Indeks pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4,4	Indeks	Triwulan III	Triwulan III
		Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	80	%	38,43	48,04%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	2,5	Indeks	3	120,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	88	%	100	113,64%
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Impor Obat, Narkotika,	Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Psikotropika, Prekursor, dan	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	49	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Zat Adiktif	Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	76	%	71,65	94,28%
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18.100	Doku- men	10.488	57,94%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4,25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	94,44	%	99,32	105,17%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	%	79,13	113,04%
		Persentase laporan pengawasan mutu, label, iklan obat, dan NPP yang ditindaklanjuti	87	%	58,42	67,15%
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60.400	Label dan Iklan	32.131	53,20%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	89,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	2,5	Indeks	3	120,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas KMEIONAPPZA	98	%	100	102,04%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar	71	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Jumlah sarana peredaran yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	850	sarana	1.201	141,29%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86	indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan post market sesuai standar	254	Kab/ Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang dilakukan sesuai standar	95	%	90,79	95,57%
		Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik	84	%	86,46	102,93%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,61	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	63.322	Permo- honan	30.884	48,77%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang optimal	2,5	Indeks	2,5	100,00%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	94	%	86	91,49%
1.10	Pengawasan Produksi Obat,	Persentase Sarana produksi Obat yang mandiri dalam Pemenuhan CPOB	65	%	88	135,38%
	Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	91	%	47,64	52,35%
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	100	%	33,33	33,33%
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	78	%	78	100,00%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	89	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	78	%	57	73,08%
		Persentase Keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, Obat, Produks Biologi dan Sarana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	80	%	66	82,50%
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	75	%	47,9	63,87%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
	-	Nilai RB Ditwas Produksi ONPP	88,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Ditwas Produksi ONPP	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2,5	Indeks	2,25	90,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas Produksi ONPP	95	%	92	96,84%
1.11	11 Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	91	%	69,99	76,91%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	93,78	98,72%
		Persentase pengaduan terkait Registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,55	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	Indeks	61,86	67,98%
		Persentase pendampingan di bidang Registrasi pangan olahan yang efektif	95	%	92,93	97,82%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2,5	Indeks	2,5	100,00%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	99	%	88	88,89%
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	89,5	%	69,29	77,42%
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	77	%	63,02	81,84%
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	79	%	77,84	98,53%
		"Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi obat yang ditindaklanjuti "	100	%	100	100,00%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Obat	4,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		"Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB"	87	%	88,89	102,17%
		"Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat "	100	%	0	0,00%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	90,1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	89,3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2,5	Indeks	1,5	60,00%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	95	%	100	105,26%
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	94	%	82,30	87,55%
	Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	83	%	90	108,43%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	75	%	93,88	125,17%
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik	4,55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	83	%	84,64	101,98%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	78	%	90,30	115,77%
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	88	%	88,22	100,25%
		Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	89,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	2,5	%	3	120,00%
		Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	97	%	90	92,78%
1.14	Standardisasi Obat Tradisional,	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	83,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai tahapan penyusunan	93	%	55	59,14%
		Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	92,5	%	95,15	102,86%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	95,5	%	100	104,71%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88,8	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2,75	Indeks	3	109,09%
		Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	%	100	100,00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	77,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	94	%	48,79	51,90%
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	90	%	94,52	105,02%
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	92	%	70	76,09%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	91	%	100	109,89%
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2,5	Indeks	2,5	100,00%
		Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	%	75	75,00%
1.16	Standardisasi Obat,	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	86,1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Narkotika, Psikotropika,	Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholders yang efektif	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Prekursor, dan Zat Adiktif	Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	90	%	43,38	48,20%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	89,3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		"Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA"	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		"Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal"	2,5	Indeks	3,00	120,00%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	%	100	100,00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan sesuai dengan pedoman	72	%	37,70	52,36%
	Usaha Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	34	%	50	147,06%
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	300	Kab/ Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95,5	%	Triwulan III	Triwulan III
		Jumlah PKP/fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	227	UMK	201	88,55%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4,55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	446	Pemda	Triwulan III	Triwulan III
		Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	740	Kader/ fasilita- tor	598	80,81%
		Tingkat efektivitas KIE makanan	95,12	%	95,93	100,85%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	87	%	26	29,89%
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	86,75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2,5	Indeks	2,5	100,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92	%	85,23	92,64%
1.18	18 Pengembang- an Pengujian Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/ Pengujian	86	%	84,45	98,20%
		Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan dan penguatan Balai POM	30	%	24,40	81,33%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	92	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		"Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium"	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	91,2	%	86,71	95,08%
		Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	90,63	%	84,43	93,16%
		"Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar"	100	%	46,15	46,15%
		"Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu"	94	%	99,75	106,12%
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	86	%	71,43	83,06%
		Indeks RB PPPOMN	87,6	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	80,2	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Status Akreditasi	86	nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,5	Indeks	3	120,00%
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	95,3	nilai	75,80	79,54%
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan	70	%	44,80	64,00%
	dan makanan	Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	86	%	34,25	39,83%
		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti	85	%	66,67	78,44%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase Perkara yang Meningkat Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis	52	%	50	96,15%
		Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi Laporan Kejadian	65	%	57,14	87,91%
		Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar	70	%	46,81	66,87%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	66,3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	2,5	Indeks	3	120,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	91	%	90	98,90%
1.20	Analsis Kebijakan di bidang Obat	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan dibidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	dan Makanan	Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96	%	69,94	72,85%
		Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79,6	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,9	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,5	Indeks	3	120,00%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,5	nilai	60,43	65,33%
		Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100	%	100	100,00%
		Indeks kepuasan internal terhadap layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,63	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	84	Nilai	86,14	102,55%
1.21	Pemberdayaan Ma-syarakat dan Pelaku	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Usaha OT, SK, Kos	Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisonal, suplemen kesehatan dan kosmetik	84	%	41,67	49,61%
		Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	86	%	45,92	53,40%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan OT,SK dan Kos	84	%	75	89,29%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos	84	%	83,33	99,20%
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kos yang sesuai standar	96	%	65,81	68,55%
		Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	96,08	%	97,95	101,95%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4,25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos	294	komuni- tas	135	45,92%
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	2,2	Indeks	2,5	113,64%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99	%	52,51	53,04%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	87,15	102,53%
	di Bidang Peredaran Obat	Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti	80	%	82,28	102,85%
	dan Makanan melalui Siber	Persentase Profil Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	86,95	102,29%
		Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan	90	%	92,21	102,46%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	78,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86,9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2,5	Indeks	2,5	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	90	%	75	83,33%
2	Program Dukungan	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	34,4	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Manajemen	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Opini	WTP	100,00%
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	74,22	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,5	Nilai	84,93	89,87%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Media	77	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kerja sama yang efektif	88	%	43,36	49,27%
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,06	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	8,77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	99,01	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2.1	Peningkatan penyelengga- raan Kerjasama dan Hubungan	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan- selatan (KSST)	2	Negara	Triwulan III	Triwulan III
	Masyarakat BPOM	Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	84	%	71,74	85,40%
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	2,5	Indeks	2,75	110,00%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	%	95	105,56%
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,85	%	98,69	98,84%
		Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	88	%	44,36	50,41%
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	79	%	70,77	89,58%
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95,5	%	98,29	102,92%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	%	42,35	48,13%
		Indeks kepuasan media	77	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks opini publik BPOM	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,87	Indeks	3,95	102,07%
2.2	Koordinasi	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,74	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Perumusan Renstra dan Rencana	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	74,22	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Tahunan, Peny- usunan Doku- men Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	96	Nilai	56,65	59,01%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,57	Nilai	97,36	101,87%
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP	100	%	50	50,00%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,84	Indeks	3,49	90,89%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	81,39	%	62,43	76,70%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	52	52,00%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	37,42	37,42%
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2,5	Indeks	2,75	110,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	%	100	100,00%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
2.3	Koordinasi Penyusunan	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	4,63	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Peraturan Perundang-	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	7,43	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	undangan,	Nilai RB BPOM Penataan tata laksana	5,71	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Advokasi Hukum, serta	Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,85	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Organisasi dan tata laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,8	Indeks	3,82	100,53%
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase peraturan perundang- undangan yang disusun	100	%	61,14	61,14%
		Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,6	%	99,06	99,46%
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	96,26	%	96,31	100,05%
		Indeks Pelayanan Publik	4,6	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	87,25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi	2,5	Indeks	2,75	110,00%
		Tingkat efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95,7	%	95,7	100,00%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	6,04	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Manusia	Indeks Sistem Merit	0,94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3,47	Indeks	3,48	100,29%
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	77	Indeks	52,54	68,23%
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	93	%	99,71	107,22%
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,07	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	74	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang diimplementasikan sesuai perencanaan	82,5	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro SDM	84,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM	2,5	Indeks	3	120,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	%	90	90,00%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
2.5	Pengemban- gan SDM	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	81	%	79,11	97,67%
	Aparatur Badan POM	Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	851	SDM	426	50,06%
		Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	4,71	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	62	%	28,20	45,48%
		Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	94	Kerja Sama	70,59	75,10%
		Nilai Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,47	Nilai	4,64	103,80%
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi	93	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan pembinanaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	55	%	80,60	146,55%
		Nilai kepuasaan Layanan PFM	4,1	Nilai	4,43	108,05%
		Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	89	Nilai	30	33,71%
		Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	87	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	85	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal	2,5	Indeks	3,00	120,00%
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	94,5	Nilai	67,87	71,82%
		Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	94	%	84	89,36%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
2.6	Pengelolaan	Indeks SPBE BPOM	3,3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Teknologi	Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,45	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Informasi Komunikasi,	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	96	%	97,19	101,24%
	Data dan Informasi Obat	Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	39	%	37,50	96,15%
	dan Makanan	Indeks CSIRT (Computer Security Indeks Respon Time)	4	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan	90	%	57,62	64,02%
		Jumlah Data Berbagi Pakai	25	%	15	60,00%
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	52	52,00%
		Persentase sistem informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	85	Nilai	80,53	94,74%
		Persentase Pemenuhan Infrastuktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	28	28,00%
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	81,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,9	nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3	Indeks	3	100,00%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastuktur, Data dan Keamanan	75	%	60,80	81,07%
		Sertifikasi ISO 27001	1	sertifikat	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	94,8	Nilai	51,10	53,90%
2.7	Pengawasan dan	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,06	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Peningkatan Akuntabilitas	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Aparatur I	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat I	4	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah Inspektorat I	99,01	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94	%	Triwulan III	Triwulan III
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I	85,9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	100	100,00%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	95	%	90,04	94,78%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase Pengaduan Mitra Kerja Inspektorat I yang Ditindaklanjuti sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100	%	37,50	37,50%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	72,22	76,83%
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil monev rencana aksi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	82	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Inspektorat I	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Kapabilitas APIP	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	87,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2,5	Indeks	3	120,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	91	Indeks	75	82,42%
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,06	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	4	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99,01	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	85,9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	%	100	100,00%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	95	%	97,2	102,32%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100	%	100	100,00%
		Persentase permintaan layanan konsultansi mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	100	106,38%
		Persentase Rekomendasi Hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat II	82	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Inspektorat II	86,1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Kapabilitas APIP	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86,25	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,5	Indeks	3	120,00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	91	%	86	94,51%
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	94	%	Triwulan III	Triwulan III
2.9	Pengelolaan	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	92	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Sarana dan	Indeks Pengelolaan Aset BPOM	2,95	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
	Prasarana BPOM	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	74	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3,78	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100	Persen	61,54	61,54%



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	89	Persen	80	89,89%
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	85	Persen	59,04	69,46%
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	87	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	88	Persen	91,36	103,82%
		Indeks RB Biro Umum	84,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum	76	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2,5	Indeks	3	120,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	91	%	92	101,10%



LAMPIRAN II

Serapan Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Sampai dengan Juni Sumber : Aplikasi OmSpan

(Per 30 Juni 2023)



A. UNIT PUSAT

NO	UNIT KERJA	Т	OTAL PAGU	
NO	ONIT KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan	364.734.836.000	171.816.037.606	47,11%
1.1	Biro Kerjasama	15.698.337.000	6.614.882.090	42,14%
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	0.997.974.000	9.403.868.344	44,78%
1.3	Biro Hukum dan Organisasi	13.608.599.000	6.615.384.062	48,61%
1.4	Biro Umum	123.266.485.000	53.710.898.653	43,57%
1.5	Biro Sumber Daya Manusia	191.163.441.000	95.471.004.457	49,94%
2	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	58.777.422.000	26.257.629.639	44,67%
2.1	Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	9.762.277.000	4.707.560.602	48,22%
2.2	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	13.084.827.000	5.694.665.918	43,52%
2.3	Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	12.464.912.000	5.073.464.935	40,70%



NO	UNIT KERJA	Т	OTAL PAGU	
NO	ONII KERJA	PAGU	REALISASI	%
2.4	Dit. Registrasi Obat	12.501.315.000	5.484.655.102	43,87%
2.5	Dit. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	10.964.091.000	5.297.283.082	48,31%
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	54.877.335.000	25.274.629.909	46,06%
3.1	Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	12.417.422.000	5.036.240.556	40,56%
3.2	Dit. Pengawasan Kosmetik	10.540.301.000	4.383.549.610	41,59%
3.3	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	11.904.081.000	5.403.565.181	45,39%
3.4	Dit. Standadisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	7.215.901.000	3.917.894.827	54,30%
3.5	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	12.799.630.000	6.533.379.735	51,04%
4	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	67.424.016.000	27.354.626.925	40,57%
4.1	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	17.924.637.000	8.061.823.766	44,98%
4.2	Dit. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	14.373.577.000	6.427.152.892	44,72%



NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU				
NO	ONIT KERJA	PAGU	REALISASI	%		
4.3	Dit. Registrasi Pangan Olahan	9.611.993.000	4.821.093.766	50,16%		
4.4	Dit. Standrdisasi Pangan Olahan	9.123.257.000	2.894.981.178	31,73%		
4.5	Dit. Pengawasan Produksi Pangan Olahan	16.390.552.000	5.149.575.323	31,42%		
5	Deputi Bidang Penindakan	55.537.240.000	21.724.590.881	39,12%		
5.1	Dit. Siber Obat dan Makanan	11.672.409.000	5.082.946.622	43,55%		
5.2	Dit. Intelijen Obat dan Makanan	7.945.762.000	4.580.258.265	57,64%		
5.3	Dit. Penyidikan Obat dan Makanan	8.089.254.000	3.873.709.005	47,89%		
5.4	Dit. Cegah Tangkal	27.829.815.000	8.187.676.989	29,42%		
6	Inspektorat Utama	29.615.574.000	13.312.110.561	44,95%		
6.1	Inspektorat I	22.966.753.000	10.080.544.852	43,89%		
6.2	Inspektorat li	6.648.821.000	3.231.565.709	48,60%		
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	77.515.080.000	33.189.460.352	42,82%		
8	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	23.934.915.000	7.642.246.803	31,93%		
9	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	60.676.165.000	20.893.293.669	34,43%		
10	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan	49.092.088.000	18.603.235.119	37,89%		
	TOTAL SATKER PUSAT	842.184.671.000	366.067.861.464	43,47%		



B. BALAI BESAR / BALAI POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	Kendari	29.399.482.000	16.859.455.380	57,35%
2	Mamuju	20.784.898.000	11.714.067.873	56,36%
3	Jambi	34.242.011.000	17.432.899.714	50,91%
4	Palu	24.385.351.000	12.279.726.004	50,36%
5	Banda Aceh	27.258.618.000	13.631.208.251	50,01%
6	Pekan Baru	35.439.413.000	17.475.111.667	49,31%
7	Denpasar	43.730.018.000	21.432.588.946	49,01%
8	Gorontalo	18.539.331.000	9.075.483.118	48,95%
9	Batam	22.295.115.000	10.743.431.344	48,19%
10	Pangkal Pinang	16.470.120.000	7.909.981.547	48,03%
11	Manokwari	20.871.326.000	9.953.066.733	47,69%
12	Ambon	34.310.935.000	16.249.566.626	47,36%
13	Bengkulu	28.585.736.000	13.362.014.915	46,74%
14	Palembang	30.797.586.000	14.285.622.401	46,39%
15	Manado	47.280.940.000	21.542.783.773	45,56%
16	Serang	29.039.947.000	13.176.509.353	45,37%



NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
17	Medan	46.622.399.000	20.617.622.871	44,22%
18	Mataram	23.995.139.000	10.606.712.257	44,20%
19	Samarinda	28.816.721.000	12.656.549.747	43,92%
20	Palangkaraya	21.461.208.000	9.392.944.869	43,77%
21	Jakarta	50.733.517.000	22.077.012.946	43,52%
22	Bandar Lampung	32.139.343.000	13.646.426.320	42,46%
23	Pontianak	27.729.090.000	11.749.007.771	42,37%
24	Kupang	30.215.555.000	12.074.469.929	39,96%
25	Bandung	75.260.350.000	29.790.011.330	39,58%
26	Semarang	61.686.206.000	24.163.268.820	39,17%
27	Surabaya	61.048.715.000	23.443.793.823	38,40%
28	Makassar	56.664.763.000	21.000.437.879	37,06%
29	Jayapura	28.568.667.000	10.508.100.609	36,78%
30	Banjarmasin	32.194.714.000	11.592.299.245	36,01%
31	Tarakan	15.155.947.000	5.440.246.214	35,90%
32	Yogyakarta	45.092.304.000	15.469.790.770	34,31%
33	Padang	58.808.691.000	18.349.616.669	31,20%
34	Sofifi	22.467.454.000	5.994.347.648	26,68%
	TOTAL SATKER BALAI	1.182.091.610.000	505.696.177.362	42,78%

KINERJA BPOM DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2023





Jln. Percetakan Negara Jakarta Pusat 10560





www.pom.go.id



halobpom@pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI